

## **Siaran Pers**

### **PEMERINTAH INDONESIA JALIN KERJASAMA DENGAN UNFPA UNTUK PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEDEPAN**

**JAKARTA** – Pemerintah Indonesia dan the *United Nations Population Fund* (UNFPA) hari ini (29/3) menandatangani *Country Programme Action Plan* (CPAP) Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA untuk lima tahun ke depan (2016-2020). Selain itu, dilakukan pula penandatanganan *Programme Document* (Prodoc) dan *Multi Years Work Plan* (MYWP) 2016-2017. Dokumen tersebut berisi tentang rencana kerja Kementerian/Lembaga (K/L) mitra pelaksana dengan UNFPA, yang merupakan penjabaran dari CPAP.

Program kerjasama Pemerintah RI-UNFPA yang mengalokasikan investasi sebesar USD 24 juta tersebut memiliki 4 fokus tujuan akhir, yaitu mendukung: 1) kesehatan ibu, pencegahan HIV dan keluarga berencana; 2) remaja dan generasi muda; 3) kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk praktek-praktek berbahaya; dan 4) dinamika kependudukan serta data. Selain itu, Pemerintah RI dan UNFPA akan terus mempromosikan dialog kebijakan dan advokasi terkait isu *International Conference on Population and Development* (ICPD) tahun 1994 dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Finalisasi CPAP yang baru, harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Rencana Strategis UNFPA 2014-2017, dan Kerangka Kerja Kemitraan Pembangunan Indonesia-PBB 2016-2020,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil pada saat penandatanganan.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Perwakilan UNFPA, Dr. Annette Sachs Robertson mengatakan finalisasi CPAP adalah hasil dari proses konsultasi yang intensif dengan melibatkan berbagai mitra-mitra nasional, termasuk pemerintah, para pakar, masyarakat dan organisasi keagamaan, serta generasi muda.

“Dokumen final CPAP ini merefleksikan penguatan dan kematangan kerjasama antara UNFPA dan Pemerintah Indonesia. Saya sampaikan terima kasih kepada Bappenas yang telah memimpin proses penyusunan CPAP ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra pelaksana. Melihat proses yang kooperatif yang telah dilakukan dalam penyusunan CPAP ini, saya yakin bahwa program siklus ke sembilan ini akan berlangsung lebih baik berdasarkan standar yang telah disepakati bersama dalam lima tahun terakhir ini,” jelas beliau.

Perubahan prioritas UNFPA dan peralihan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah (*Middle-Income Country*) mengharuskan fokus kerjasama ini tidak lagi bergerak dalam bidang pelayanan, tetapi lebih pada dialog kebijakan, advokasi, dan manajemen pengetahuan.

UNFPA memulai kemitraan dengan Pemerintah Indonesia di tahun 1972 dan mengimplementasikan program melalui kerjasama dengan berbagai K/L, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, BPS, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Selain itu, UNFPA juga mempertahankan jalinan kerjasama dengan LSM, organisasi keagamaan, swasta, serta jejaring generasi muda dan perempuan.

Jakarta, 29 Maret 2016

Thohir Afandi  
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Kementerian PPN/Bappenas  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310  
Telepon (021) 31936207, 3905650; Faksimile  
(021) 3145374  
Email: [humas@bappenas.go.id](mailto:humas@bappenas.go.id)